

MODEL PENGEMBANGAN KEMITRAAN USAHA PERIKANAN TANGKAP DENGAN LEMBAGA KEUANGAN DI KABUPATEN INDRAMAYU

Developing Model of Co-Management Capture Fishing Efforts with Financial Institutions in Indramayu Regency

Oleh:

Charles Bohlen Purba¹, John Haluan², Domu Simbolan², Sugeng H. Wisudo²

Diterima: 14 Juni 2008; Disetujui: 28 Desember 2008

ABSTRACT

Less on developing and contributing fisheries sector on Gross National Product (GNP), especially capture fishing efforts in Indramayu Regency, dominantly because of capital limitation and imprecisely capture fishing sector development. This research is trying to analyze financial feasibility of capture fishing sector and its relationship with financial institutions. The analyzing methods would be referred to Hanley and Spash (1993) there are Net Present Value (NPV), Net Benefit – Cost Ratio (B/C Ratio), Internal Rate of Return (IRR), Return of Investment (ROI), and Payback Period (PP). The results shows that capture fishing with payang, drift gill net (JIH) and state gill net (JIT) are capture fisheries efforts with good financial conditions (NPV Payang = Rp 169.798.012, NPV JIH = Rp 344.738.291, NPV JIT = Rp 454.465.535, and the other five capture fisheries efforts have NPV, B/C Ratio, IRR, ROI and PP appropriate with terms and conditions, then its could be more development and proper to get financial institutions support. Capture fisheries with fishhook and fishing line are not properly to be develop. There are four potential financial institutions which could support the capture fisheries efforts, but for now, only Jabar-Banten Bank and KPL Mina Sumitra which needed its actions. And the kind of credits/payments/ services which could be optimally used from Jabar-Banten Bank are Micro Credits and Peduli Credits, with each reaching Rp 422.400.000 and Rp 105.600.000 each year. KPL Mina Sumitra consist of Investment Credits, Micro Credits and Development Services are reaching Rp 9.280.000.000, Rp 928.000.000 and Rp 464.000.000 each year. There are financial institution which not needed its services because of the credits scale which offered are not suitable, the relations not connected, there are problems in collateral, and trust factor.

Key words: financial, credits, financial institutions, capture fishing efforts

ABSTRAK

Kurang berkembangnya dan berkontibusinya sektor perikanan terhadap PDBN, khususnya usaha perikanan tangkap di Kabupaten Indramayu sebagian besar disebabkan oleh keterbatasan modal dan kurang tepatnya usaha perikanan yang dikembangkan. Penelitian ini mencoba menganalisis kelayakan finansial usaha perikanan dan kemitraannya dengan lembaga keuangan. Metode analisis mengacu kepada Hanley dan Spash (1993) meliputi analisis *Net Present Value* (NPV), *Net Benefit–Cost Ratio* (B/C ratio), *Internal Rate of Return* (IRR), *Return of Investment* (ROI), dan *Payback Period* (PP). Hasil analisis menunjukkan bahwa usaha perikanan payang, jaring insang hanyut (JIH) dan jaring insang tetap (JIT) merupakan usaha perikanan tangkap yang kondisi finansialnya bagus (NPV payang = Rp 169.798.012, NPV JIH = Rp 344.738.291, NPV JIT = Rp 454.465.535) dan kelima usaha perikanan tangkap mempunyai nilai NPV, B/C ratio, IRR, ROI, dan PP sesuai yang disyaratkan, sehingga dapat dikembangkan dan layak mendapat dukungan dari lembaga keuangan, sedangkan pancing lainnya dan rawai tetap tidak layak. Ada empat lembaga keuangan potensial yang dapat mendukung usaha perikanan tersebut, namun untuk saat ini hanya Bank Jabar-Banten dan KPL Mina Sumitra yang dibutuhkan perannya. Adapun jenis kredit/pembiayaan/jasanya yang dapat dioptimalkan untuk maksud tersebut adalah pada Bank Jabar-

¹ Kanwil Ditjen Perbendaharaan Jakarta. Email: bohlenpurba@yahoo.com

² Dept. Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, FPIK, IPB

Banten terdiri dari Kredit Mikro dan Kredit Peduli masing-masing sekitar Rp 422.400.000 dan Rp 105.600.000 per tahun, dan pada KPL Mina Sumitra terdiri dari Kredit Investasi, Kredit Mikro, dan jasa pembinaan usaha masing-masing hingga menjadi Rp 9.280.000.000, Rp 928.000.000 dan Rp 464.000.000 per tahun. Beberapa lembaga keuangan yang belum berperan disebabkan skala kredit yang ditawarkan tidak cocok, relasinya belum terbangun, masalah penjaminan serta faktor kepercayaan.

Kata kunci: finansial, kredit, lembaga keuangan, usaha perikanan tangkap

1. PENDAHULUAN

Kegiatan perikanan di Indonesia, hingga saat ini masih didominasi oleh usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), baik oleh nelayan penangkap maupun nelayan pengolah hasil tangkapan. Karakteristik tersebut dapat dilihat dari statistik perikanan tahun 2006 yang menunjukkan bahwa dari 412.497 unit armada perikanan yang digunakan oleh seluruh nelayan di Indonesia sekitar 90,9% merupakan perahu tanpa motor, perahu motor tempel dan kapal motor yang berukuran dibawah 5 GT. Hasil penelitian Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan jumlah usaha kecil dan menengah (UKM) di Indonesia pada tahun 2006 mencapai hampir 49 juta unit. Dari angka tersebut hanya 13% saja yang mampu mengakses perbankan, sedangkan yang 87% mengandalkan modal sendiri.

Sumbangan sektor perikanan terhadap Produk Domestik Brutto Nasional (PDBN) hanya sekitar 4,04 % atau Rp. 71,9 triliun dari total Rp. 1.778,7 triliun (BPS, 2008), meskipun sektor ini mempunyai jangkauan usaha sangat luas dan UKM yang paling banyak. Kurang berkembangnya sektor perikanan, khususnya usaha perikanan tangkap juga terlihat di pesisir utara Kabupaten Indramayu. Salah satu permasalahan utama yang dihadapi terletak pada keterbatasan modal menjalankan usaha. Hingga saat ini masih sedikit lembaga keuangan, baik milik pemerintah maupun swasta, dan lembaga-lembaga pembiayaan lainnya yang menjalin mitra dengan usaha nelayan ini. Hal ini karena usaha perikanan tangkap yang dilakukan nelayan kebanyakan tidak layak dikembangkan, sehingga dapat merugikan lembaga keuangan pemberi kredit.

2. TUJUAN

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kondisi finansial dan jenis usaha perikanan tangkap yang layak didukung oleh lembaga keuangan, mengidentifikasi lembaga keuangan potensial dan jenis kredit yang ditawarkan, menganalisis lembaga keuangan yang paling di-

butuhkan perannya saat ini dan alokasi optimal kreditnya dalam mendukung usaha perikanan tangkap di Kabupaten Indramayu.

3. METODOLOGI

3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama 9 (sembilan) bulan dimulai dari bulan April 2008 sampai dengan Desember 2008 di wilayah pesisir utara Kabupaten Indramayu

3.2 Jenis Data yang Dikumpulkan

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, mencakup potensi sumberdaya ikan, kapal dan alat tangkap, produksi, pembiayaan usaha, siklus usaha, dan harga jual, lembaga keuangan, lingkup mitra usaha, jenis kredit, keuntungan, dan lainnya

3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data primer terdiri dari pemilihan kecamatan pesisir di setiap lokasi, penetapan desa sampling, identifikasi responden, dan pengumpulan data responden. Metode pengumpulan data sekunder terdiri dari studi literatur, konsultasi pakar, dan kombinasi keduanya.

3.4 Metode Analisis

3.4.1 Analisis finansial usaha perikanan tangkap

1) *Net Present Value* (NPV)

Net Present Value (NPV) digunakan untuk menilai manfaat investasi usaha perikanan tangkap yang merupakan jumlah nilai kini dari manfaat bersih dan dinyatakan dalam rupiah. Bila $NPV > 0$ berarti investasi menguntungkan, sedangkan bila $NPV < 0$ berarti investasi tidak menguntungkan atau usaha perikanan tangkap tersebut tidak layak dilaksanakan.

2) Benefit-Cost Ratio (B/C ratio)

Benefit-Cost Ratio (B/C ratio) merupakan perbandingan antara total manfaat bersih investasi usaha perikanan tangkap yang bersifat positif, dengan total manfaat kotor investasi usaha perikanan tangkap yang bersifat negatif. Bila B/C ratio > 1, maka investasi menguntungkan, sedangkan bila B/C ratio ≤ 1 berarti investasi tersebut tidak layak, sehingga menjadi pertimbangan negatif bagi dukungan lembaga keuangan.

3) Internal Rate of Return (IRR)

Internal Rate of Return (IRR) merupakan suku bunga maksimal untuk sampai kepada NPV = 0, jadi dalam keadaan batas untung rugi. Usaha perikanan tangkap dinyatakan "layak" bila IRR > dari *interest rate* (suku bunga) yang berlaku. Bila IRR sama dengan *interest rate* yang berlaku maka nilai NPV = 0 (nol), dan jika IRR < dari *interest rate* yang berlaku maka nilai NPV < 0 (nol), berarti usaha perikanan tangkap tersebut tidak layak dikembangkan.

4) Return of Investment (ROI)

Return of Investment (ROI) digunakan untuk mengukur tingkat pengembalian investasi dari manfaat yang diterima pemilik. Usaha perikanan tangkap dinyatakan layak bila mempunyai ROI > 1, dan dinyatakan tidak layak bila mempunyai ROI < 1.

5) Payback Period (PP)

Payback Period (PP) digunakan untuk mengetahui lamanya pengembalian investasi dari benefit (pendapatan) yang diterima pemilik.

3.4.2 Penetapan jenis usaha perikanan tangkap yang layak didukung oleh lembaga keuangan

Jenis usaha perikanan tangkap di pesisir utara Kabupaten Indramayu yang potensial mendapat dukungan dari lembaga keuangan didasarkan pada hasil analisis NPV, B/C ratio, IRR, ROI, dan PP. Bila usaha perikanan tangkap tersebut mempunyai NPV > 0, B/C ratio > 1, IRR lebih besar dari *interest rate* (suku bunga) yang berlaku, dan ROI > 1, dan PP < 1, maka usaha perikanan tersebut layak dikembangkan dan didukung oleh lembaga keuangan. *Interest rate* (i) bank yang digunakan dalam analisis ini mengacu kepada Bank Indonesia (2009) yaitu 9,5 %.

3.4.4 Analisis Linier Goal Programming (LGP)

Analisis *linier goal programming* (LGP) digunakan untuk mengoptimalkan peran kredit/pembiayaan/jasa lembaga keuangan dalam mendukung usaha perikanan tangkap dinyatakan layak. Model *linear goal programming* untuk optimalisasi peran ini adalah :

Fungsi tujuan :

$$Z = \sum_{i=1}^m (DB_i + DA_i)$$

Fungsi pembatas :

$$DB_1 - DA_1 + a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + \dots + a_{1n}x_n = b_1$$

$$DB_2 - DA_2 + a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 + \dots + a_{2n}x_n = b_2$$

$$DB_m - DA_m + a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + a_{m3}x_3 + \dots + a_{mn}x_n = b_m$$

Dimana :

Z = total deviasi yang akan diminimumkan,

DB_i = Deviasi bawah pembatas ke-i,

DA_i = Deviasi atas pembatas ke-i,

C_j = parameter fungsi tujuan ke-j,

b₁ = kapasitas /ketersediaan pembatas ke-i,

a_{ij} = parameter fungsi pembatas ke-i pada variabel keputusan ke-j,

X_j = variabel putusan ke-j (jumlah dan jenis lembaga keuangan),

pembatas ke-i = jenis kredit/pembiayaan/jasa i dari lembaga keuangan,

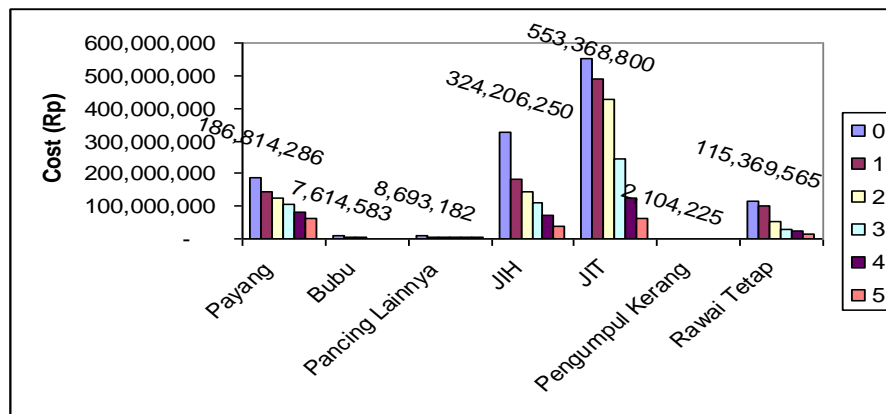
X_j, DA_i dan DB_i > 0, untuk i = 1, 2, ..., m

dan j = 1, 2, ..., n

4. HASIL PENELITIAN

4.1 Hasil Analisis Pembiayaan dan Manfaat Usaha Perikanan Tangkap

Kabupaten Indramayu merupakan basis usaha perikanan tangkap yang sangat diperhitungkan. Jenis usaha perikanan tangkap yang cukup diperhitungkan dan diusahakan cukup signifikan adalah usaha perikanan payang, usaha perikanan bubu, usaha perikanan pancing lainnya, usaha perikanan jaring insang hanyut (JIH), usaha perikanan jaring insang tetap (JIT), usaha pengumpulan kerang, dan usaha perikanan rawai tetap. Usaha perikanan tangkap tersebut berkembang secara turun-temurun. Jaring insang hanyut (JIH) dan jaring insang tetap (JIT) merupakan usaha perikanan cukup dominan dan diusahakan dalam skala besar oleh nelayan di Kabupaten Indramayu. Pengumpulan kerang merupakan usaha perikanan tangkap skala kecil, namun banyak digemari oleh remaja dan ibu-ibu sehingga terkadang dianggap usaha sampingan. Hasil analisis finansial terkait pembiayaan usaha perikanan tangkap di Kabupaten Indramayu disajikan pada Gambar 1.



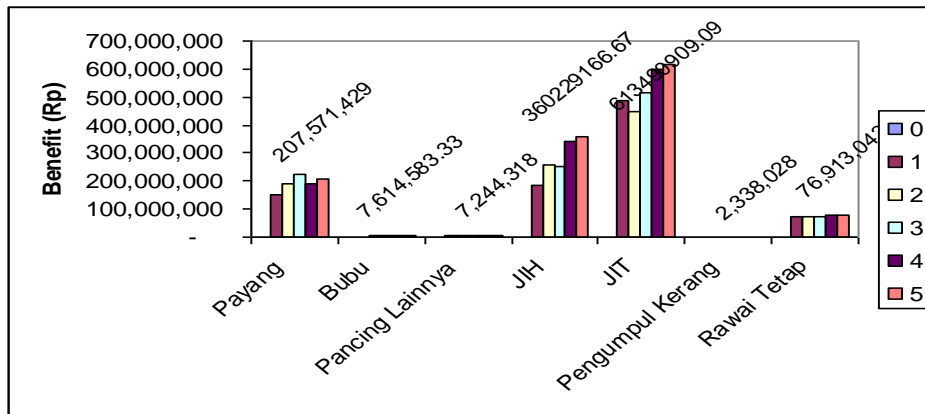
Gambar 1 Kondisi pembiayaan (cost) usaha perikanan tangkap di Kabupaten Indramayu.

Untuk pembiayaan awal (investasi) usaha perikanan payang, usaha perikanan bubu, usaha perikanan pancing lainnya, usaha perikanan jaring insang hanyut (JIH), usaha perikanan jaring insang tetap (JIT), usaha pengumpulan kerang, dan usaha perikanan rawai tetap membutuhkan modal berturut-turut adalah Rp 186.814.286, Rp 7.614.583, Rp 8.693.182, Rp 324.206.250, Rp 553.368.800, Rp 2.104.225, dan Rp 115.369.565. Pembiayaan awal ini dibutuhkan untuk pengadaan alat tangkap, armada, dan kelengkapannya. Modal awal usaha perikanan jaring insang tetap (JIT) dan jaring insang hanyut (JIH), kebanyakan digunakan untuk pengadaan armada, karena armada yang disiapkan cukup besar dan diharapkan dapat menjangkau perairan luas dengan waktu operasi 1-3 bulan per tripnya.

Melihat jumlah pembiayaan setelah investasi tersebut, hasil analisis menunjukkan bahwa pembiayaan usaha perikanan tangkap di Kabupaten Indramayu terus mengalami penurunan setiap tahunnya. Jaring insang tetap (JIT) merupakan usaha perikanan tangkap dengan penurunan biaya operasi yang cukup signifikan. Usaha pancing lainnya merupakan usaha perikanan tangkap dengan penurunan yang kecil. Tahun ke-5, usaha perikanan payang, usaha perikanan bubu, usaha perikanan pancing lainnya, usaha perikanan jaring insang hanyut (JIH), usaha perikanan jaring insang tetap (JIT), usaha pengumpulan kerang, dan u-

saha perikanan rawai tetap di Kabupaten Indramayu berturut-turut adalah Rp 62.271.429, Rp 761.458, Rp 3.259.943, Rp 36.022.917, Rp 61.349.091, Rp 233.803, dan Rp 15.382.609.

Hasil analisis finansial terhadap manfaat (*benefit*) tujuh usaha perikanan tangkap di Kabupaten Indramayu pada Gambar 2 menunjukkan bahwa usaha perikanan jaring insang tetap (JIT) merupakan usaha dengan manfaat terbesar di Kabupaten Indramayu. Selain besar, manfaat usaha perikanan jaring insang tetap (JIT) cenderung meningkat meskipun pernah mengalami penurunan pada tahun ke-2 pengoperasiannya. Pada tahun ke-5 pengoperasiannya, usaha perikanan payang, usaha perikanan bubu, usaha perikanan pancing lainnya, usaha perikanan jaring insang hanyut (JIH), usaha pengumpulan kerang, dan usaha perikanan rawai tetap memberikan manfaat berturut-turut Rp 207.571.429, Rp 7.614.583, Rp 7.244.318, Rp 360.229.166, Rp 2.338.028, dan Rp 76.913.043. Dari tujuh usaha perikanan tersebut, hanya usaha payang dan jaring insang hanyut yang pernah mengalami penurunan dalam penerimaan manfaat. Meskipun pernah menurun, manfaat dari kedua usaha perikanan tersebut sangat fantastis dibandingkan usaha perikanan rawai tetap dan pancing lainnya. Usaha perikanan rawai tetap dan pancing lainnya termasuk usaha yang cukup stabil dalam penerimaan/manfaat tahunnya.



Gambar 2 Kondisi manfaat (benefit) usaha perikanan tangkap di Kabupaten Indramayu.

4.2 Hasil Analisis Kelayakan Finansial Usaha Perikanan Tangkap

Hasil analisis finansial lanjutan menggunakan parameter NPV, B/C ratio, IRR, ROI, dan PP untuk setiap usaha perikanan tangkap yang ada di Kabupaten Indramayu ditunjukkan oleh Tabel 1. Tabel 1 memperlihatkan bahwa usaha perikanan lainnya dan rawai tetap mempunyai NPV yang negatif yaitu masing-masing Rp 1.766.209 dan Rp 8.814. Nilai NPV tersebut memberi indikasi bahwa jika kedua usaha perikanan tangkap ini dilakukan, akan menyebabkan penerimaan bersih yang diterima nelayan (NPV) pancing lainnya pada suku bunga berlaku (9,5 %) selama waktu pengoperasian 5 tahun adalah berupa kerugian sebesar Rp 1.766.209 dan yang diterima nelayan rawai tetap pada suku bunga berlaku (9,5 %) selama waktu pengoperasian 5 tahun adalah berupa kerugian sebesar Rp 8.814.

Usaha perikanan payang, usaha perikanan bubu, usaha perikanan jaring insang hanyut

(JIH), usaha perikanan jaring insang tetap (JIT), dan usaha pengumpulan kerang mempunyai NPV yang positif, yaitu masing-masing Rp 169.798.012, Rp 4.293.350, Rp 344.738.291, Rp 454.465.535, dan Rp 2.956.018. Nilai NPV usaha perikanan jaring insang hanyut (JIH) dan usaha perikanan jaring insang tetap (JIT) paling besar, yang berarti ketiga usaha perikanan tangkap tersebut memberikan keuntungan cukup menjanjikan selama waktu pengoperasiannya.

Hasil analisis terhadap parameter B/C ratio menunjukkan bahwa usaha perikanan jaring insang hanyut (JIH), usaha perikanan jaring insang tetap (JIT) dan usaha perikanan pengumpulan kerang mempunyai B/C ratio yang besar. Ketiga usaha perikanan ini memberikan manfaat besar, masing-masing 1,61, 1,40, dan 1,71 kali lebih besar daripada jumlah pembiayaan yang dikeluarkan selama waktu pengoperasian usaha tersebut.

Tabel 1 Hasil analisis kelayakan finansial usaha perikanan tangkap di Kabupaten Indramayu

Jenis Usaha Perikanan	Parameter Finansial						Keterangan
	NPVi	B/C	IRR	ROI	PP		
Payang	Rp 169.798.012	1.37	27.93%	5.18	0.19	Layak	
Bubu	Rp 4.293.350	1.37	16.58%	4.10	0.24	Layak	
Pancing Yang Lain	Rp (1.766.209)	1.01	0.76%	3.91	0.26	Tidak Layak	
JIH	Rp 344.738.291	1.61	29.13%	4.30	0.23	Layak	
JIT	Rp 454.465.535	1.40	23.14%	4.80	0.21	Layak	
Alat Pengumpul Kerang	Rp 2.956.018	1.71	34.43%	4.95	0.20	Layak	
Rawai Tetap	Rp (8.814)	1.11	6.44%	3.25	0.31	Tidak Layak	

Sumber : Hasil analisis data lapangan (2008)

Usaha perikanan payang, jaring insang hanyut (JIH), jaring insang tetap (JIT), dan pengumpulan kerang termasuk usaha perikanan tangkap dengan nilai IRR besar di Kabupaten Indramayu, yaitu masing-masing 27,93 %, 29,12 %, 23,14 %, dan 34,43 %. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa menginvestasikan uang pada usaha perikanan payang, jaring insang hanyut (JIH), jaring insang tetap (JIT), dan pengumpulan kerang akan mendatangkan keuntungan yang relatif besar yang lebih tinggi daripada disimpan di bank (suku bunga hanya 9,5 % per tahun), yaitu masing-masing 27,93 %, 29,12 %, 23,14 %, dan 34,43 % per-tahunnya. Hasil analisis usaha perikanan pancing lainnya dan rawai tetap menunjukkan hanya mendatangkan keuntungan masing-masing 0,76 % dan 6,44 %, dan nilai ini lebih rendah dari suku bunga yang berlaku, sehingga investasi di bank sebaiknya lebih dipilih daripada menjalankan kedua usaha perikanan tangkap tersebut.

Hasil analisis terhadap parameter ROI menunjukkan bahwa usaha perikanan payang, bubu, jaring insang hanyut (JIH), jaring insang tetap (JIT), dan pengumpulan kerang termasuk usaha perikanan tangkap mempunyai tingkat pengembalian investasi (ROI) bagus, yaitu masing-masing 5,18, 4,10, 4,30, 4,80, dan 4,95. Usaha perikanan payang paling tinggi ROI-nya yang menunjukkan bahwa usaha ini dapat mengembalikan investasi sebesar 5,18 kali dari investasi yang ditanam. Hasil analisis terhadap parameter PP menunjukkan bahwa usaha perikanan payang mempunyai perputaran usaha paling cepat/singkat yaitu hanya 0,19.

4.3 Lembaga Keuangan Potensial dan Jenis Kreditnya

Hasil survei lapangan menunjukkan ada empat lembaga keuangan yang dapat dijadikan mitra kerja usaha perikanan tangkap terpilih di Kabupaten Indramayu, yaitu Bank Jabar-Banten, KPL Mina Sumitra, Bank Danamon, dan Bank Rakyat Indonesia (BRI). Kredit yang umum disediakan oleh Bank Jabar-Banten terdiri dari kredit peduli Jabar-Banten dengan nilai sekitar Rp 5.000.000 kredit mikro dengan nilai berkisar antara Rp 10.000.000 – Rp 20.000.000 (umumnya disetujui Rp 20.000.000), dan kredit mikro utama dengan nilai berkisar antara Rp 20.000.000 Rp 50.000.000 (umumnya disetujui setengah dari alokasi maksimum, yaitu Rp 25.000.000). Kredit yang diberikan oleh KPL Mina Sumitra ada tiga jenis, yaitu kredit investasi, kredit pembiayaan usaha, dan kredit mikro. Kredit investasi biasanya berkisar antara Rp 75.000.000–Rp 200.000.000 namun biasanya yang disetujui Rp 100.000.000. Kredit pembiayaan usaha yang nilainya mencapai

Rp 100.000.000,- biasanya disetujui hanya sekitar Rp 25.000.000. Kredit mikro dimanfaatkan oleh nelayan buruh atau nelayan pemilik usaha perikanan kecil dengan nilai disetujui sekitar Rp 10.000.000. KPL Mina Sumitra juga memberikan jasa pelatihan dan pembinaan kepada para nelayan. Pelatihan tersebut biasanya dianggarkan sekitar Rp 5.000.000 per pelatihan.

Bank Danamon memberikan kredit pada sektor perikanan, pertanian dan peternakan yang terdiri dari kredit *Mass Market*, kredit Usaha Kecil dan Menengah (UKM), dan kredit mikro. Kredit *Mass Market* termasuk besar, namun biasanya diberikan sekitar Rp 125.000.000. Nilai Kredit Usaha Kecil dan Menengah berkisar Rp 25.000.000 – Rp 50.000.000, namun biasanya disetujui sekitar Rp 30.000.000. Kredit mikro bisa mencapai Rp 5.000.000 hingga Rp 15.000.000, dan namun biasanya disetujui sekitar Rp 10.000.000.

Jenis kredit yang bisa dimanfaatkan oleh usaha perikanan tangkap dan dari Bank Rakyat Indonesia ini adalah kredit bisnis umum, kredit agribisnis, kredit modal kerja (KMK), dan kredit usaha pedesaan (KUPEDAS). Kredit bisnis umum merupakan jenis kredit untuk menengah ke atas di BRI, namun biasanya disetujui sekitar Rp 100.000.000. Kredit agribisnis lebih dikhususkan kepada usaha agribisnis bidang pertanian, peternakan, dan perikanan, dan nilai yang biasanya disetujui sekitar Rp 20.000.000. Kredit Modal Kerja (KMK) termasuk kredit kecil dan retail di BRI yang biasanya diberikan untuk membantu tambahan modal usaha dari pelaku usaha kecil, dan nilai kredit yang disetujui biasanya sekitar Rp 10.000.000. Sedangkan Kredit Usaha Pedesaan (KUPEDAS) merupakan kredit yang banyak dimanfaatkan oleh pelaku usaha mikro dengan nilai/*plafond* mencapai Rp 100.000.000, namun yang biasanya disetujui sangat kecil yaitu sekitar Rp 3.000.000.

4.4 Hasil Analisis Alokasi Optimal Kredit/Pembiayaan/Jasa Pada Usaha Perikanan Tangkap

Hasil analisis LGP menunjukkan hanya ada dua lembaga keuangan yang dibutuhkan perannya saat ini dengan lima jenis kredit/pembiayaan/jasa yang dapat dioptimalkan alokasinya untuk mendukung usaha perikanan tangkap yang dinyatakan layak dikembangkan di Kabupaten Indramayu. Tabel 2 menggambarkan alokasi kredit Bank Jabar-Banten dapat dioptimalkan menjadi dua jenis kredit, yaitu Kredit Mikro dan Kredit Peduli hingga masing-masing menjadi Rp 422.400.000 dan Rp 105.600.000 per tahun. Kredit Mikro merupakan kredit yang banyak dimanfaatkan oleh usaha skala

menengah atau kecil yang perputaran usahanya cukup bagus. Di Kabupaten Indramayu, kredit ini dimanfaatkan oleh pedagang, kegiatan pengolahan, dana beberapa usaha nelayan. Kredit ini dapat dimanfaatkan oleh usaha perikanan bubu yang perputarannya cukup cepat (1 - 2 hari *trip*). Sedangkan Kredit Peduli dapat dioptimalkan pemanfaatannya oleh kelompok usaha pengumpulan kerang atau lainnya yang dinyatakan layak dikembangkan. Selama ini, Kredit Peduli dari Bank Jabar-Banten ini banyak dimanfaatkan oleh pedagang ikan dan nelayan yang operasinya bersifat harian. Hal ini karena nilai kredit dan sistem angsurannya yang cukup sesuai dengan siklus usaha mereka. Nilai yang disetujui untuk Kredit Mikro dari Bank Jabar-Banten ini biasanya Rp 5.000.000 dengan angsuran sekitar tiga bulan.

KPL Mina Sumitra merupakan lembaga keuangan yang sangat diandalkan pelaku usa-

ha perikanan tangkap di Kabupaten Indramayu. Selama ini ini, KPL Mina Sumitra menjadi penyedia utama modal investasi, modal kerja dan berbagai keperluan melaut yang dibutuhkan nelayan. KPL Mina Sumitra sangat dekat dengan masyarakat nelayan dan pedagang/pengolah ikan di lokasi karena anggotanya berasal dari kalangan nelayan dan pelaku usaha perikanan lainnya di Kabupaten Indramayu, khususnya yang berbasis di TPI Karangsong. Kredit investasi merupakan kredit paling besar yang dapat diberikan oleh KPL Mina Sumitra. Selama ini kredit ini banyak dimanfaatkan oleh kelompok nelayan/juragan untuk mengadakan/memperbaiki sarana penangkapan yang dimiliki. Nilai kredit ini dapat dioptimalkan sehingga menjadi Rp 9.280.000.000,00 per tahunnya. Kredit mikro di KPL Mina Sumitra banyak dimanfaatkan oleh pelaku usaha perikanan skala kecil seperti bubu, alat pengumpul kerang, dan pancing yang lain.

Tabel 2 Alokasi optimal kredit/pembiayaan/jasa dari lembaga keuangan pada usaha perikanan tangkap di Kabupaten Indramayu

No.	Jenis Lembaga Keuangan	Nama Kredit/ Pembiayaan/Jasa	Alokasi Optimal Kredit/ Pembiayaan/Jasa	Usaha Perikanan Tangkap Sasaran
1.	Bank Jabar-Banten	Kredit Peduli	Rp 422.400.000	<ul style="list-style-type: none"> • Payang • Bubu • Jaring Insang Hanyut (JIH) • Jaring Insang Tetap (JIT) • Alat Pengumpul Kerang
		Kredit Mikro	Rp 105.600.000	
2.	KPL. Mina Sumitra	Kredit Investasi	Rp 9.280.000.000	
		Kredit Mikro	Rp 928.000.000	
		Pembinaan Usaha	Rp 464.000.000	

Sumber : Olahan hasil analisis data lapangan (2008)

Kredit mikro di KPL Mina Sumitra banyak dimanfaatkan oleh pelaku usaha perikanan skala kecil seperti bubu, alat pengumpul kerang, dan pancing yang lain. Oleh karena pancing yang lain termasuk tidak layak dikembangkan di lokasi, maka sebaiknya tidak menjadi sasaran kredit mikro lagi, karena dapat menjadi sumber konflik. Untuk ke depan, alokasi Kredit Mikro ini dapat diatur sehingga menjadi Rp 928.000.000 per tahun. KPL Mina Sumitra juga selalu memberikan pembinaan dalam bentuk pelatihan-pelatihan sebagai bentuk pengabdian non pamrih kepada anggota. Pelatihan dan pembinaan tersebut biasanya diberikan dengan bekerjasama dengan Syah Bandar, Dinas KP, dan lainnya. Hal ini karena sumberdaya manusia yang dimiliki oleh KPL Mina Sumitra sangat terbatas. Selama ini alokasi untuk pembinaan anggota hanya sekitar Rp 100.000.000, maka dapat ditingkatkan menjadi Rp 464.000.000 per tahun. Biaya pembinaan ini memang cukup besar, tetapi dengan peningkatan kinerja anggota baik nelayan, pengusaha, pedagang, pengolah ikan dan lainnya yang berbasis di TPI Karangsong

melalui berbagai pembinaan yang dilakukan KPL Mina Sumitra, maka biaya tersebut sangat kecil.

5. PEMBAHASAN

Pembiayaan ke-7 usaha perikanan tangkap di Kabupaten Indramayu yang cenderung menurun setiap tahunnya memberi indikasi bahwa tidak permasalahan serius yang terjadi pada usaha perikanan tangkap setelah dilakukan investasi di tahun pertama. Hal ini bisa disebabkan oleh kecenderungan nelayan khususnya yang berskala besar yang lebih memiliki peralatan penangkapan kuat dan berkualitas tinggi, walaupun dengan investasi relatif mahal. Kondisi ini bisa terlihat dari pembiayaan awal (investasi) usaha perikanan payang, usaha perikanan jaring insang hanyut (JIH), usaha perikanan jaring insang tetap (JIT), dan usaha perikanan rawai tetap yang sangat besar masing-masing mencapai Rp 186.814.286,

Rp 24.206.250, Rp 553.368.800, Rp 2.104.225, dan Rp 115.369.565. (Gambar 1).

Pembiayaan yang besar dari nelayan tersebut juga berdampak cukup positif pada manfaat (*benefit*) yang diberikan. Nelayan-nelayan dari usaha perikanan payang, JIH, JIT, dan rawai tetap mendapatkan keuntungan cukup besar (NPV payang = Rp 169.798.012, NPV JIH = Rp 344.738.291, NPV JIT = Rp 454.465.535) meskipun tidak selalu meningkat (lihat Tabel 1). Selama ini nelayan dapat menjangkau perairan yang luas dalam melakukan penangkapan, dan dapat berhari-hari di laut karena armada penangkapan yang dimiliki memadai. Namun, pola penangkapan ini juga terkadang memberatkan bila hasil tangkapan turun karena nelayan tetap membutuhkan biaya besar untuk tetap melaut. Kondisi ini menjadi penyebab manfaat (*benefit*) usaha penangkapan terkadang menurun, misal pada usaha perikanan JIT di ke-2 pengoperasiannya. Terkait dengan ini, maka dukungan lembaga keuangan sangat diperlukan termasuk juga untuk membantu usaha perikanan skala kecil usaha perikanan bubu, usaha perikanan pancing lainnya, dan usaha pengumpulan kerang.

Usaha pancing lainnya dan rawai tetap mempunyai nilai NPV, B/C ratio, dan IRR yang tidak standar, sehingga bila dilakukan dapat merugi. Parameter finansial ini perlu menjadi perhatian, supaya nelayan tidak terjebak pada usaha-usaha perikanan tangkap yang justru mempersulit nelayan dan menjadi masalah sosial di lokasi. Terkait dengan ini, maka dari 7 jenis usaha perikanan tangkap yang banyak diusahakan nelayan di Kabupaten Indramayu tersebut hanya ada 5 jenis usaha yang dapat dilanjutkan dan layak didukung oleh lembaga keuangan, yaitu usaha perikanan payang, usaha perikanan bubu, usaha perikanan jaring insang hanyut (JIH), usaha perikanan jaring insang tetap (JIT), dan usaha pengumpulan kerang.

Lembaga keuangan yang tidak dibutuhkan perannya dengan berbagai jenis kredit/jasa/pembiayaannya dapat disebabkan oleh skala kredit yang ditawarkan tidak cocok bagi nelayan, relasinya belum terbangun, masalah penjaminan serta faktor kepercayaan. Untuk skala kredit misalnya, meskipun Bank Jabar-Banten termasuk lembaga keuangan yang dibutuhkan peran dan kemitraannya, tetapi untuk kredit mikro utamanya tidak dibutuhkan karena pembiayaan yang dibutuhkan oleh usaha perikanan tangkap layak tidak ada yang berkisar antara Rp 20.000.000 – Rp 50.000.000. Pembiayaan tahunan yang dibutuhkan setiap usaha perikanan tangkap tersebut di Kabupaten Indramayu sekitar Rp 100.000.000 untuk payang, Rp 10.000.000 untuk bubu, Rp 150.000.000

untuk JIH, Rp 150.000.000 untuk JIT, dan Rp 3.000.000 untuk usaha pengumpulan kerang.

Masalah relasi, selama ini Bank Danamon belum melakukan pendekatan pada usaha perikanan tangkap. Hal yang sama juga untuk Bank Rakyat Indonesia, mereka menganggap KPL Mina Sumitra telah mengambil peran yang cukup banyak sehingga menyulitkan untuk masuk ke masyarakat pesisir. Akibat dari kondisi ini, maka biaya mungkin akan lebih besar dan upaya akan sia-sia bila harus mencari nasabah secara sengaja ke lokasi tersebut, padahal untuk masalah penjaminan tak bisa ditawar-tawar.

Masalah penjaminan, memang hampir semua lembaga keuangan memperlakukan lemahnya kemampuan nelayan dan masyarakat pesisir dalam penyediaan jaminan yang dibutuhkan. Lembaga keuangan, umumnya mengharapkan jaminan berupa sertifikat tanah, rumah, gedung, dan lainnya yang tidak bergerak, sedangkan nelayan umumnya mempunyai perahu yang sifatnya bergerak sehingga berpeluang untuk hilang atau tenggelam. Beberapa nelayan yang memiliki rumah atau tanah, umumnya tidak punya sertifikat atau lainnya. Mereka kesulitan dalam mengurus surat-surat tersebut karena birokrasi yang berbelit-belit dan biaya perijinan yang mahal. Faktor kepercayaan juga merupakan hal penting yang menjadi pertimbangan lembaga keuangan. Beberapa nelayan ada yang berasal dari luar Indramayu sehingga sangat sulit menjalin komitmen dengan mereka. Hal lain, beberapa nelayan yang sudah berkomitmen dengan lembaga keuangan, juga terkadang tidak ditepati bila mereka sedang kepepet sehingga justru membuat konflik dengan lembaga keuangan. Lembaga keuangan yang menjalin mitra dengan nelayan di Kabupaten Indramayu selama ini diantaranya KPL Mina Sumitra, Bank Jabar-Banten, Bank Rakyat Indonesia dan Bank Danamon. Kredit atau mitra lainnya dari tiga Bank Jabra-Banten, Bank Rakyat Indonesia dan Bank Danamon sangat terbatas dan belum terlihat dikembangkan lanjut. KPL Mina Sumitra menjadi satu-satunya lembaga keuangan yang intensif membantu nelayan karena kebetulan lembaga keuangan ini merupakan bentukan nelayan, namun sampai pada kondisi tertentu dananya juga terbatas. Kondisi ini memerlukan kesadaran dan pengertian dari semua pihak terutama kalangan nelayan dan aparat pemerintah daerah sehingga lembaga keuangan merasa aman dalam memberikan kredit dan nelayan dapat memanfaatkan kredit yang ada.

6. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Pembiayaan ke-7 usaha perikanan tangkap di Kabupaten Indramayu cenderung menurun setiap tahunnya. Usaha perikanan payang, jaring insang hanyut (JIH) dan jaring insang tetap (JIT) merupakan usaha perikanan tangkap yang fantastis dan menjanjikan (NPV payang = Rp 169.798.012, NPV JIH = Rp 344.738.291, NPV JIT = Rp 454.465.535). Lima dari tujuh usaha perikanan tangkap yang banyak diusahakan oleh nelayan di Kabupaten Indramayu, yaitu usaha perikanan payang, usaha perikanan bubu, usaha perikanan jaring insang hanyut (JIH), usaha perikanan jaring insang tetap (JIT), dan usaha pengumpulan kerang mempunyai NPV, B/C ratio, IRR, ROI, dan PP sesuai yang dipersyaratkan sehingga lima usaha perikanan tangkap tersebut layak didukung pengembangannya.

Bank Jabar-Banten, KPL. Mina Sumitra, Bank Danamon, dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) merupakan lembaga keuangan yang potensial mendukung usaha perikanan tangkap layak di lokasi. Namun untuk saat ini, hanya Bank Jabar-Banten dan KPL. Mina Sumitra yang dibutuhkan perannya dengan lima jenis kredit/pembiayaan/jasa yang dapat dioptimalkan alokasinya. Kredit pada Bank Jabar-Banten adalah Kredit Mikro dan Kredit Peduli

dapat dioptimalkan alokasinya hingga masing-masing mencapai Rp 422.400.000 dan Rp 105.600.000 per tahun. Pada KPL Mina Sumitra, kredit/pembiayaan/jasa adalah Kredit Investasi, Kredit Mikro, dan jasa pembinaan usaha, masing-masing dapat dioptimalkan menjadi Rp 9.280.000.000, Rp 928.000.000, dan Rp 464.000.000 per tahun. Adanya lembaga keuangan yang tidak dibutuhkan perannya dengan berbagai jenis kredit/jasa/pembiayaannya dapat disebabkan oleh skala kredit yang ditawarkan tidak cocok bagi nelayan, relasinya belum terbangun, masalah penjaminan serta faktor kepercayaan.

6.2 Saran

Akses pemodalannya bagi usaha perikanan tangkap yang termasuk kategori layak dikembangkan perlu dipermudah dalam bentuk kemudahan perijinan dan birokrasi, serta aparat PEMDA perlu membantu penjaminan yang dibutuhkan oleh lembaga keuangan/perbankan terutama bagi nelayan yang kurang mampu.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik (BPS). 2008. Data Statistik Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Jakarta.